

**COMMUNITY DEVELOPMENT BERBASIS EMPOWERMENT SEBAGAI STRATEGI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENCAPAIAN MDGs 2015**

**OLEH :  
AGUNG PRATAMA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

***Disampaikan pada Seminar Nasional Demokrasi dan Masyarakat Madani*  
UNIVERSITAS TERBUKA  
Tangerang Selatan - Jumat, 13 Juli 2012**

## DAFTAR ISI

Abstrak.....	2
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
I.1. Latar Belakang.....	3
I.2. Tujuan.....	4
I.3. Ruang Lingkup Materi.....	4
<b>BAB II KERANGKA TEORI.....</b>	<b>2</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>6</b>
III.1. Problem Pendefinisian Kemiskinan.....	6
III.2. Penurunan Angka Kemiskinan Melalui <i>Community Based Poverty Reduction</i> .....	11
III.2.1. <i>Poverty Social Mapping</i> .....	11
III.2.2. Sosialisasi Program.....	13
III.2.3. Workshop dan Training.....	13
III.2.4. Perluasan Akses Modal.....	12
III.2.5. Monitoring dan Evaluasi Berkala Program.....	15
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>16</b>
IV.1. Kesimpulan.....	16
IV.2. Saran.....	16
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>

## Abstrak

Kesepakatan penetapan 8 target MDGs 2015 oleh 189 Kepala Negara pada September 2000 menjadi sebuah jawaban atas kejenuhan yang dirasakan dunia atas rendahnya pencapaian pembangunan mayoritas negara di dunia. Setelah hampir 12 tahun berjalan semenjak ditetapkan, ternyata konteksnya yang terjadi di Indonesia, pencapaian MDGs di Indonesia masih tergolong rendah. Poin-poin yang tercantum dalam implementasi MDGs hanya dibebankan pada pemerintah saja, padahal keberhasilan sebuah kebijakan akan terlaksana apabila dilaksanakan oleh seluruh elemen negara, terutama pihak mayoritas yaitu masyarakat (*Civil Society*). Komitmen pelaksanaan yang lemah juga menjadi problem penghambat tercapainya target implementasi MDGs 2015. Oleh karena itu, melalui harmonisasi antara pemerintah dan masyarakat, dapat memperkecil kemungkinan melemahnya komitmen implementasi pencapaian MDGs, karena antara kedua belah pihak akan terjadi saling kontrol (*check and balances*) sehingga antusiasme implementasi strategi akan berjalan secara stabil. Kaitannya dengan wacana demokrasi, dalam MDGs terkandung substansi lebih detail terkait implementasi demokrasi yang substansial. Demokrasi seharusnya bersifat empiris (kontekstual) atau relevan di tataran lokal. MDGs tidak akan mampu menyentuh masyarakat terpencil seperti di desa-desa jika dijalankan tanpa peran dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, *Community Development* berbasis *Empowerment* berusaha memberi sebuah *framework* solusi percepatan pencapaian target MDGs 2015. Pemerintah di satu sisi sebagai (*authority owner*) menjalankan fungsinya sebagai konseptor strategi dan penanggung jawab utama, sedangkan masyarakat hendak diberdayakan melalui perannya sebagai warga negara yang sah. *Community Development* berbasis *Empowerment* adalah bekerja bersama masyarakat dengan keberdayaannya sehingga mereka dapat mendefinisikan dan menangani masalah, serta terbuka untuk menyatakan kepentingan-kepentingannya sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Melalui konsep ini, masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai objek, tetapi ikut terlibat mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawabannya.

**Kata Kunci :** *Community Development, Empowerment, kemiskinan.*

# BAB I

## I. PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Kita pasti sudah mengetahui bahwa dewasa ini, isu kemiskinan menjadi begitu lazim untuk dibahas dan menjadi fokus perhatian serius tidak hanya oleh pemerintah, akademisi, lembaga-lembaga informal, organisasi internasional, dan CSO-pun turut membicarakan masalah ini. Belum lagi setelah penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda dunia yang terangkum dalam 8 target pencapaian MDGs 2015 nanti.

Kemiskinan di Indonesia sendiri menjadi sebuah dilema yang dirasakan pemerintah. Pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya telah berusaha menanggulangi problem kemiskinan sejak lama, namun hasilnya belum juga terlihat. Data dari BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36%). Angka ini jelas masih sangat tinggi dibandingkan target capaian MDGs 2015. Belum lagi ternyata Indonesia adalah negara yang masuk 10 besar sebagai negara penyumbang kemiskinan dunia seperti yang terlihat pada tabel ini.

TABEL 1.1 Sepuluh Teratas Negara Mewakili 84,24% dari Kemiskinan Dunia (dibawah US \$ 1 Per Hari)

Urutan	Negara	Persentase dari Kemiskinan Dunia
1.	India	41.01%
2.	China	22.12%
3.	Nigeria	8.03%
4.	Pakistan	3.86%
5.	Bangladesh	3.49%
6.	Brazil	1.82%
7.	Ethiopia	1.82%
<b>8.</b>	<b>Indonesia</b>	<b>1.49%</b>
9.	Mexico	1.43%
10.	Russia	99%

Source: NationMaster, 2008

Kini, Indonesia hanya memiliki waktu kurang lebih 3 tahun lagi untuk memaksimalkan usaha mencapai target penurunan angka kemiskinan masyarakat.

Untuk itu, perlu sebuah inovasi akselerasi agar mampu memaksimalkan masyarakat sebagai basis pemberdayaan dalam rangka penurunan angka kemiskinan itu sendiri.

Inefisiensi birokrasi menjadi sebab pencapaian MDGs di Indonesia masih bersifat sektoral dan *fragmented*. Di wilayah-wilayah perkotaan yang dekat dengan fasilitas publik dan kemudahan akses dalam menerima manfaat pembangunan, angka masyarakat miskin mengalami penurunan yang cukup berkala. Namun pada daerah pedesaan, temuan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan tidak banyak menerima kebijakan berbentuk bantuan dalam rangka penurunan angka kemiskinan. Secara keseluruhanpun penurunan angka kemiskinan di Indonesia tidaklah signifikan sejak ditetapkannya penurunan angka kemiskinan sebagai agenda besar dunia dalam MDGs 2015.

Pemaksimalan usaha penurunan angka kemiskinan sebetulnya bisa dilakukan dengan pemaksimalan peran *public-private partnership* untuk mendorong berkembangnya *small and medium enterprises* dalam lapisan masyarakat miskin. Hal ini ditujukan untuk memperbesar antusiasme *beneficiaries* untuk mengembangkan potensi wirausahanya sendiri, dengan tujuan mengajarkan dan memberikan keberdayaan bagi mereka. Namun konteksnya, yang menjadi realita adalah peranan *public-private partnership* ternyata masih lemah dan kurang mengakar.

## **I.2. Tujuan**

Penulisan makalah dengan judul “**Community Development Berbasis Empowerment Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan dalam Rangka Percepatan Pencapaian MDGs 2015**” ini bertujuan untuk “menjual” sebuah rumusan strategi percepatan penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan kapasitas masyarakat itu sendiri.

## **I.3. Ruang Lingkup Materi**

Materi yang akan disajikan dalam makalah ini lebih bersifat praksis dengan menyajikan sebuah konsep pemberdayaan yang sudah diterapkan di suatu wilayah penduduk miskin perkotaan di Indonesia. Lahirnya konsep strategi penurunan angka kemiskinan ini dikaji melalui gabungan antar teori Nach (*Need for achievement*) dari Mc. Clelland dan teori hubungan dialogis dan metode konsientasi dari Paolo Freire.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

Masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat atau *community* dalam bahasa Inggris atau juga komunitas. Secara etimologis "*community*" berasal dari *communitat* yang berakar pada *comunete* atau *common*.

*Community* mempunyai dua arti (Talizi, 1990 : 49) yaitu :

- a. Sebagai kelompok sosial yang bertempat tinggal di lokasi tertentu, memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama
- b. Sebagai satuan pemukiman yang terkecil, di atasnya ada kota kecil (*town*), dan di atas kota kecil ada kota atau kota besar (*city*).

Pemberdayaan masyarakat sebagai konsep dalam pembangunan memiliki perspektif yang luas. Pemberdayaan berarti pembangunan kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan (Pranarka, 63 : 65).

Pemberdayaan adalah alat untuk mencapai tujuan (*means to an end*), untuk memperkuat kapasitas organisasi/kelompok mereka agar mampu mengubah keadaan saat ini, memiliki kekuatan untuk mendorong terjadinya perubahan besar yang sangat diperlukan dalam masyarakat.

Chambers dalam bukunya *Rural Development Putting the Last First* (1983 ; 113-114) menyampaikan konsep "perangkap derivasi" (*concept of deprivation trap*) yang menganalisis penyebab kemiskinan sebagai kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dari ketidakberdayaan (*power lessness*), kerapuhan (*vulnerability*), kelemahan fisik (*Physical weakness*), kemiskinan (*poverty*) dan keterasingan (*isolation*). Ada keterkaitan (link) antara ketidakberdayaan dan dimensi perangkap lain. Ketidakberdayaan membatasi akses terhadap sumber daya negara, memperumit keadilan hukum bagi penyelewengan (*abuses*), menyebabkan hilangnya kekuatan tawar menawar (*bargaining power*), membuat rakyat semakin rapuh dalam berhadapan dengan kekuasaan lain. Akhirnya dikatakan bahwa situasi ketidakberdayaan itu dapat diatasi dengan "*enabling and empowering the poor*", yang merupakan upaya penting karena kemiskinan bukan merupakan kondisi alamiah semata-mata melainkan suatu proses pengingkaran pemberdayaan secara sosial, ekonomi, dan politis (*social, economic, and political disempowerment*).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang amat serius. Guna membahas masalah ini, perlu dilakukan identifikasi apa yang dimaksud dengan miskin atau kemiskinan dan bagaimana ukurannya.

(Sunyoto Usman, 2004 : 125-136) mengemukakan tiga macam konsep kemiskinan, yaitu :

**a. Kemiskinan Absolut**

Kemiskinan absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkret (*afixed yard stick*). Ukuran itu lazimnya berorientasi pada “kebutuhan hidup dasar minimum” anggota masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan. Masing-masing negara mempunyai batasan kemiskinan absolut yang berbeda-beda tergantung kebutuhan dasar masyarakat dalam setiap negara juga berlainan.

**b. Kemiskinan Relatif**

Kemiskinan relatif dirumuskan berdasarkan “*the ideas of relative standard*”, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, dan kemiskinan pada suatu waktu berbeda dengan waktu lainnya. Konsep kemiskinan semacam ini lazimnya diukur berdasarkan pertimbangan (*in terms of judgement*) anggota masyarakat tertentu dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup.

**c. Kemiskinan Subyektif**

Kemiskinan subyektif dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal *a fixed yardstick*, dan tidak memperhitungkan *the idea of relatives standard*. Kelompok yang menurut ukuran kita berada di bawah garis kemiskinan, boleh jadi tidak menganggap dirinya sendiri miskin atau sebaliknya. Sebaliknya, kelompok yang dalam perasaan kita tergolong hidup dalam kondisi tidak layak, boleh jadi tidak menganggap seperti itu. Oleh karena itu, konsep ini dianggap lebih tepat apabila dipergunakan untuk alat analisis untuk memahami kemiskinan dan merumuskan cara atau strategi yang efektif untuk penanggulangannya karena mampu menyentuh indikator-indikator terkecil yang dirasakan oleh masyarakat miskin.

Setiap usaha peningkatan taraf kehidupan masyarakat harus menyertakan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan terhadap masyarakat adalah upaya memberikan peluang serta kesempatan kepada pekerja untuk meningkatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki, serta secara mandiri menentukan masa depan yang mereka inginkan. Oleh karena itu, diperlukan dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang bagi perbaikan keadaan diri dan lingkungannya dikemukakan oleh Mc. Clelland dengan teori Nach atau *Need for Achievement*. Ia mengatakan bahwa kegagalan pembangunan sebuah masyarakat disebabkan karena masyarakat bersikap fatalistis dan menerima nasib tanpa perlawanan. Oleh karena itu, agar pembangunan berhasil masyarakat harus diubah dan didorong untuk memiliki Nach. Salah satu cara yang diajukan oleh teori ini adalah dengan mendidik mereka. Untuk menumbuhkan

kesadaran tersebut, diperlukan sebuah intervensi atau stimulasi dari luar sebagai langkah awal.

Freire menawarkan bahwa sesungguhnya pendidikan semestinya dilakukan secara dialogis. Proses dialogis ini merupakan satu metode yang masuk dalam agenda besar pendidikan Paulo Freire yang disebutnya sebagai proses penyadaran (konsientisasi). Menurut Freire (1972), konsientisasi merupakan proses kemanusiaan yang eksklusif. "Konsientisasi adalah sebuah proses dialektis di mana kaum miskin dan tertindas makin lama makin sadar akan situasi ketertindasannya dan kemudian berkehendak untuk mengubah kondisinya".

Menurut teori hubungan dialogis Freire, gagasan tersebut mengharuskan bahwa pekerja masyarakat (*empowerment team*) tidak memasuki hubungan yang menegaskan sebagai ahli dengan pengetahuan yang unggul, tetapi menggunakan posisi yang menghargai pengetahuan dan kearifan lokal, dan mencari dialog yang wajar dengan para anggota masyarakat untuk dapat belajar satu sama lain, sehingga mereka dapat bergerak bersama-sama untuk mencapai aksi kolektif (Ife, tesoriero, 2008:347).



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **III.1. Problem Pendefinisian Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan keadaan tidak berdaya masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari terutama berkaitan kebutuhan ekonomi. Kemiskinan juga dianggap sebagai keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Secara sederhana, Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Disamping itu, sering sekali kita temui benturan-benturan definisi mengenai kemiskinan itu sendiri. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

- Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
- Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Namun, jika kita ingin melihat kemiskinan dari tinjauan ilmiah, kita akan menemukan berbagai pendapat yang beragam, tergantung penentuan indikator dan cara pandangnya. Berikut beberapa definisi kemiskinan dari berbagai sumber :

#### **1. Biro Pusat Statistik (BPS)**

Tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu kurang dari 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori

ini berlaku untuk susunan umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk.

## **2. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)**

Badan ini mengukur kemiskinan berdasarkan kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS 1). Kriteria Keluarga Pra KS yaitu keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per orang per tahun, lantai rumah bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke Puskesmas bila sakit. Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal satu kali per minggu makan daging/telor/ikan, membeli pakaian satu stel per tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 m<sup>2</sup> per anggota keluarga, tidak ada anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang buta huruf, semua anak berumur antara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada yang sakit selama tiga bulan.

## **3. Bank Dunia**

Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang kurang dari US\$1 per hari.

Dari beberapa definisi kemiskinan tersebut, diperoleh beberapa perbedaan cara mengukur indikator kemiskinan. Penentuan definisi kemiskinan ini juga akan berpengaruh pada penetapan *beneficiaries*, karena indikator-indikator haruslah sesuai dengan realita masyarakat miskin sasaran pemberdayaan. Ketiga definisi kemiskinan tersebut adalah pengukuran kemiskinan berdasarkan kemiskinan absolut dan relatif. Maka untuk mendapatkan pengertian yang lebih tepat guna menetapkan sasaran pemberdayaan (*beneficiaries*), dipilih definisi kemiskinan subyektif, yaitu berusaha mencari, melihat, menilai, sekaligus menganalisa pengertian kemiskinan menurut calon *beneficiaries* tersebut. Sebagai masyarakat yang merasakan secara langsung kemiskinan itu sendiri, maka mereka lebih memahami bagaimana kemiskinan yang mereka rasakan dan apa sebetulnya yang mereka butuhkan untuk keluar dari kemiskinan.

## **III.2. Penurunan Angka Kemiskinan Melalui *Community Based Poverty Reduction***

Dewasa ini, konsep *Community Empowerment* telah menjadi tren strategi pembangunan di negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. *Community Empowerment* juga digunakan sebagai strategi pembangunan masyarakat dalam rangka pengentaskan kemiskinan. Hanya saja yang patut disayangkan, konsep ini

hanya matang pada tataran *planning*, namun pada tataran *executing* masih sering mengalami kendala di lapangan. Kendala-kendala yang terjadi di lapangan terjadi bahkan dari alasan sederhana yang paling mendasar seperti bagaimana kemiskinan yang mereka rasakan atau juga apa sebetulnya yang masyarakat perlukan untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Dalam makalah ini, *problem solution* yang disampaikan akan berbasis pada aspek sosiokultural pada masyarakat itu sendiri, sehingga program yang dieksekusi adalah program benar-benar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal dan tepat sasaran.

Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menjalankan program ini adalah sebagai berikut :

### **III.2.1. Poverty Social Mapping**

*Poverty Social Mapping* (Pemetaan Sosial Kemiskinan) adalah sebuah cara untuk mengetahui berbagai informasi beserta hal-hal penting yang diperlukan dalam agenda *Social Planning* untuk melahirkan sebuah bentuk program yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin setempat. *Poverty Social Mapping* harus dilakukan secara mendalam agar dapat menghasilkan bentuk program yang tepat dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat miskin setempat. Biasanya estimasi waktu *mapping* dapat berkisar 3 bulan.

Pendekatan kultural ini dilakukan melalui intervensi komunitas yang masuk dan menjadi bagian masyarakat selama beberapa waktu. Komunitas yang masuk ke dalam calon *beneficiaries* tersebut dapat berupa LSM, NGO ataupun tim-tim yang ditunjuk secara langsung oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan atau mitra pemberdayaan, tentunya dengan kriteria memiliki integritas sosial yang tinggi.

Indikator-indikator yang perlu diketahui melalui *Poverty Social Mapping* adalah sebagai berikut :

1. Memetakan apakah sasaran / *beneficiaries* adalah memang sudah tersentuh atau yang belum tersentuh oleh program bantuan dari pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Menggali akar permasalahan kemiskinan yang sebenarnya dirasakan oleh calon *beneficiaries* termasuk mengetahui definisi kemiskinan menurut seperti apa yang mereka rasakan. Mapping bisa dilakukan dengan metode PPA (*Participatory Poverty Assessment*), dimana calon *beneficiaries* diajak secara bersama-sama untuk melihat, menilai, sekaligus menganalisa apa sebetulnya definisi kemiskinan seperti yang mereka rasakan.
3. Memetakan pihak-pihak di sekitar wilayah sasaran yang memiliki peranan dalam menentukan kebijakan dan program-program dalam rangka

mengurangi angka kemiskinan. Pihak-pihak tersebut misalnya meliputi pemerintah setempat, Kepala Desa, RT/RW, LSM lokal, Karang Taruna, akademisi, organisasi kepemudaan, dan stakeholder lainnya. Di sini juga dilakukan penggalian informasi mengenai program-program penanggulangan kemiskinan seperti apa yang sudah pernah diterima masyarakat baik melalui pemerintah secara langsung maupun melalui gotong royong masyarakat setempat sendiri. Hal ini ditujukan untuk mengevaluasi sejauh mana usaha masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan menganalisis faktor kekurangan apa saja yang perlu dibenahi untuk melahirkan program pemberdayaan yang baik dan *sustainable*. Dalam *mapping* ini, dapat digunakan metode Snowball Sampling untuk menentukan informan secara lebih tepat.

Melalui informasi yang telah didapatkan, barulah analis / tim *Social Mapping* merumuskan sebuah solusi berbentuk program-program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan calon *beneficiaries*. Semakin dalam informasi yang didapatkan pada saat *Poverty Social Mapping*, akan semakin tepat pula solusi program yang akan dilahirkan oleh *Empowerment Team*.

Bentuk program yang paling baik untuk dilakukan adalah Workshop dan Training. Program ini dilakukan untuk memberikan penguatan skill dan pengetahuan keorganisasian kepada calon *beneficiaries* sebagai dasar untuk menuju keberdayaan.

### **III.2.2. Sosialisasi Program**

Program yang dirumuskan oleh *Empowerment Team* tersebut tidak langsung diterapkan ke masyarakat, melainkan harus melalui tahap sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi program dilakukan kepada calon *beneficiaries* dengan mendatangkan perwakilan dari pemerintah setempat, mitra LSM, RT/RW, BPD, Perangkat Desa, akademisi dan stakeholder lainnya. Sosialisasi dimaksudkan untuk menjalin kebersamaan antara semua pihak yang diundang agar tercipta kesadaran moral sosial sehingga masyarakat beserta pemerintah dan pihak terkait merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberhasilan program tersebut. Sosialisasi ini juga dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang sinergis antara masyarakat, pemerintah, LSM, dan pihak-pihak yang memiliki peran potensial untuk memaksimalkan program ini, sehingga selama waktu pelaksanaan, antara masyarakat, pemerintah, LSM, dan pihak-pihak yang memiliki peran potensial tadi tidak berjalan secara sendiri-sendiri.

### **III.2.3. Workshop dan Training**

Program yang paling cocok dengan iklim kebutuhan pemberdayaan masyarakat miskin adalah melalui Workshop dan Training. Melalui workshop dan training, masyarakat diberikan pengetahuan tentang hal apa saja yang mereka butuhkan dalam rangka mencapai kemandirian. Beberapa macam workshop dan training yang harus dilakukan sebagai program community empowerment kepada beneficiaries antara lain:

### **1. Workshop Penguatan Kelembagaan**

Pada suatu wilayah dalam masyarakat, sangat diperlukan lembaga-lembaga yang bisa menjadi wadah untuk berkumpul, bertukar pikiran, serta berinovasi untuk mencapai tujuan bersama. Tidak terkecuali dalam tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Workshop penguatan kelembagaan ini dilakukan sebagai bentuk respon atas perlunya sebuah organisasi / kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengertian disini bahwa calon *beneficiaries* harus terlebih dahulu bergabung dalam suatu wadah agar dapat menentukan pilihan tujuan bersamanya, serta agar dapat bekerja bersama-sama secara terkoordinir.

Dalam lembaga yang nantinya akan terbentuk, penerima manfaat (*beneficiaries*) akan menentukan pilihan mau dibawa ke arah mana organisasi yang mereka bentuk tersebut, termasuk di dalamnya bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilakukan. Peran *empowerment team* hanya sebatas sebagai fasilitator dan konsultan bagi organisasi tersebut.

### **2. Training Skill Peningkatan Kualitas Hasil Produksi dan Manajemen Usaha**

Bagi wilayah target pemberdayaan yang memiliki hasil khas yang bisa dikembangkan, setelah pengorganisasian masyarakat sudah kuat, perlu adanya pembinaan skill terhadap organisasi tersebut agar hasil produksi mereka semakin berkualitas dan memiliki daya saing tinggi.

Selain itu, sebagai kelompok yang baru terbentuk, diperlukan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana memproduktifkan wadah tersebut menjadi wadah usaha bersama. Maka dari itu, diperlukan sebuah training dasar pengelolaan / manajemen yang dilakukan untuk memberi pemahaman tentang bagaimana cara mengelola atau memajemen usaha karena ini berkaitan dengan program sebuah organisasi untuk memulai usaha bagaimana cara mengelola usaha, jenis usaha apa yang akan dilaksanakan, serta menentukan target dan prospek jangka panjang usaha tersebut.

### **3. Workshop Sinergy Social Trust antar Perangkat Pemerintahan, Stakeholders, dan Target Beneficiaries.**

Workshop ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkenalkan wadah usaha bersama hasil bentukan *beneficiaries* kepada pihak birokrasi, Dinas-Dinas terkait seperti Disperindag, Dinas Sosial, DPRD, dan stakeholders potensial seperti DPRD, perusahaan Swasta, LSM lokal, dan BUMN. Pertemuan ini akan lebih baik jika diawali pengenalan usaha apa yang telah kelompok dampingan lakukan, sehingga akan memunculkan social trust dari pihak-pihak terkait terhadap jenis usaha dan prospek prestasi yang dapat dicapai oleh kelompok dampingan tersebut.

Pertemuan ini juga ditujukan untuk mengajak pihak-pihak tersebut bersama-sama menanggulangi kemiskinan, diawali dengan bermitra dengan kelompok dampingan empowerment team dalam membantu usaha bersama mereka. Workshop akan lebih efektif bila menggunakan metode FGD (*Forum Group Discussion*), sehingga *beneficiaries* dapat bertanya langsung tentang bagaimana yang seharusnya mereka lakukan untuk memperluas akses usaha mereka dan mengemukakan pendapat dan harapannya secara langsung kepada pihak-pihak terkait dan stakeholder lainnya.

#### **III.2.4. Perluasan Akses Modal**

Setelah beberapa langkah di atas dilakukan, barulah strategi yang tidak kalah pentingnya adalah perluasan akses modal. Dalam konteks Indonesia dan pada umumnya negara ketiga di dunia, masyarakat menjadi miskin bukan karena malas, melainkan karena produktifitanya rendah. Produktifitas rendah itu diakibatkan oleh kurangnya akses dalam bidang ekonomi (modal), kesehatan, dan pendidikan. Tertutupnya akses masyarakat miskin dalam berbagai bidang terutama ekonomi, kesehatan, dan pendidikan menyebabkan mereka sulit untuk melakukan mobilitas vertikal dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan (*circle of poverty*). Masyarakat miskin tidak punya sumberdaya ekonomi atau dengan kata lain pendapatannya rendah. Pendapatan rendah menyebabkan tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, sehingga produktivitasnyapun rendah. Produktivitas rendah berdampak pada pendapatan yang rendah pula, begitu pula seterusnya.

Salah satu strategi memutus mata rantai kemiskinan yakni dengan membuka akses modal kepada masyarakat miskin sebagai *beneficiaries* sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan sekaligus mengakumulasi modalnya hingga semakin meningkat secara gradual, dan pada akhirnya kesejahteraan akan meningkat. Kesejahteraan yang meningkat akan berpengaruh pada peningkatan tingkat pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Permasalahan utama masyarakat miskin dalam mengakses modal adalah ketiadaan jaminan secara materi bagi pemberi modal (kreditor). Masalah inilah yang menyebabkan mereka sampai saat ini tidak tersentuh sama sekali oleh lembaga keuangan yang ada. Hal ini karena lembaga keuangan hanya akan memberikan bantuan berupa pinjaman kepada pihak-pihak yang mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank (*bankable*).

Dari permasalahan di atas, maka program yang paling tepat adalah membuat skema kredit (pinjaman) berbasis pemberdayaan dengan meniadakan jaminan berupa materi dan menggantinya dengan jaminan yang bersifat immateri. Jaminan tersebut tidak lain adalah jaminan berupa modal sosial (*social capital*) yang terbentuk jika terjalin ikatan solidaritas yang kuat dalam masyarakat, biasanya terdapat pada masyarakat desa. Skema penyaluran bantuan pinjaman yang ada selain mempertimbangkan aspek *community empowerment* juga dirancang untuk mengeksplorasi aspek kekuatan *social capital* yang ada. Lembaga keuangan berbasis *social capital* ini bisa dibentuk melalui inisiatif masyarakat setempat melalui *responsiveness* terhadap urgensi lembaga ini.

Sebagai contoh, di Palembang Sumatera Selatan, terdapat sebuah kelurahan yang profesi wanitanya didominasi oleh penenun songket tradisional. Menurut BPS, daerah ini merupakan daerah termiskin di kota Palembang. Selama ini ibu-ibu buruh tenun songket tradisional tersebut mendapatkan bahan benang dan dayan (kain untuk menenun) dari para majikan yang ada di pasar 16 ilir Palembang. Selama kurang lebih satu bulan, ibu-ibu tersebut menenun kain songket hingga jadi. Setelah selesai menenun songket yang telah jadi, kemudian songket tersebut dijual kembali ke para majikan yang ada di pasar 16 ilir tadi dengan harga separuh dari penjualan satu stel kain tenun songket. Ibu-ibu tersebut hanya menjadi buruh dari putaran tadi selamanya, sangat kecil kemungkinan untuk merubah pola itu karena sulitnya akses modal dan pasar yang mereka alami.

Setelah datangnya sebuah program yang mekanisme berjalannya serupa dengan beberapa langkah di atas, akhirnya para ibu-ibu berinisiatif untuk membentuk sebuah wadah dengan nama KUPS (Kelompok Usaha Pengrajin Songket). Saat ini, untuk mengatasi masalah permodalan, ibu-ibu KUPS telah berkomitmen untuk menjalankan Gerakan Tabungan Anggota yang besarnya Rp. 5.000,- perbulan dikumpulkan setiap tanggal 1. Ini merupakan sebuah contoh langkah awal yang menunjukkan peningkatan keberdayaan pada masyarakat tersebut dalam rangka melepaskan ketergantungan pinjaman mereka kepada lembaga keuangan materi dan rentenir (bank keliling).

Di desa-desa juga dapat kita temui KUD yang bisa dioptimalkan peranannya, karena akhir-akhir ini popularitas KUD sendiri sudah mulai tenggelam. Jika peran KUD dapat dimaksimalkan, maka masyarakat desa akan mendapatkan sumber pengakses modal yang tidak berwatak bankable. Saat ini yang diperlukan adalah usaha bagaimana organisasi / lembaga-lembaga lokal terutama lembaga keuangan bisa berperan maksimal di tengah-tengah masyarakat. Salah satu upaya mempertemukan masyarakat miskin / beneficiaries dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lokal adalah untuk mengaktifkan kembali peran-peran lembaga tersebut yang sempat vacuum melalui penyadaran kolektif akan pentingnya lembaga tersebut bagi masyarakat.

### **III.2.5. Monitoring dan Evaluasi Berkala Program**

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana capaian, hambatan, dan tantangan yang ditemui di lapangan selama dijalankannya program. Bila terdapat kekurangan di beberapa titik, maka program akan diformulasi ulang agar dapat dijalankan maksimal. Monitoring dan evaluasi juga bertujuan untuk meng-upgrade daya kerja kelompok dampingan dalam organisasinya. Waktu pelaksanaan secara berkala bersifat kondisional, bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi maupun *empowerment team*. Bisa setiap satu, dua, ataupun tiga bulan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1. Kesimpulan**

Guna mengimplementasikan rancangan strategi ini, awalnya yang wajib dan terpenting adalah membentuk Kelompok Swadaya masyarakat dimana dalam wadah inilah anggota *beneficiaries* melakukan aktivitas organisasinya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan mereka rasakan dalam rangka keluar dari jerat kemiskinan. Kelompok inilah yang nantinya akan mengikat mereka dalam tujuan dan cita-cita bersama. Melalui Kelompok ini, *beneficiaries* akan bergerak terstruktur dan semakin berdaya, berbeda dengan bantuan atau kebijakan secara langsung yang sifatnya personal.

Memang tantangan yang dihadapi oleh *empowerment team* saat turun ke lapangan adalah konsistensi dan integritas tim. Totalitas dengan mendahulukan kepentingan masyarakat adalah yang utama dan harus tetap dijaga. Tantangan selanjutnya adalah kurangnya pihak-pihak yang mau bermitra sebagai penyedia dana untuk menjalankan program ini. Dana program adalah promotor awal berjalannya setiap program. Ketersediaan dana menjadi sangat penting untuk menjamin program dapat terlaksana sesuai estimasi waktu dan rancangan mekanisme jalannya program.

#### **IV.2. Saran**

Proses pemberdayaan masyarakat dalam rangka strategi percepatan penurunan angka kemiskinan ini perlu didukung oleh lembaga pendamping, selain tim pendamping yang disebut sebagai *empowerment team* yang bertugas sebagai fasilitator (pemandu), komunikator (penghubung), dan dinamisator (penggerak) dan sifatnya sementara sampai kelompok dampingan dapat berfungsi secara mandiri, juga memerlukan peranan dari tokoh masyarakat setempat, instansi teknis, tokoh akademisi, mitra dari yayasan sosial, Swasta, dan departemen / Kementerian Negara terkait.

Oleh karena itu, hendaknya pihak-pihak tersebut dapat membantu secara moril maupun materil terlaksananya program ini. Bantuan penyediaan dana dari pihak-pihak berpotensi begitu diharapkan program ini dapat berjalan, karena geliat-geliat masyarakat di berbagai daerah sudah mulai kelihatan. Ini menunjukkan masyarakat sudah memiliki sensitivitas dalam melihat peluang-peluang yang dapat mereka gunakan dalam tujuan mengeluarkan dirinya dari kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ife, Jim – Tesoriero Frank. 2008, *Community Development*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Roesmidi - Risyanti Riza. 2006, *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Alqaprint Jatinangor.
- Sugiyanto. 2002, *Lembaga Sosial*. Yogyakarta : Global Pustaka Utama.
- Kotler, Philip – Lee Nancy R. 2008, *Up and Out of the Poverty – Social Marketing Sollution*. United States of America : Pearson Education.